

HUBUNGAN PAD, BELANJA MODAL DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

Eka Sintala Dewi Ajani ¹

Akram ²

Lilik Handajani ²

¹ Dinas Kehutanan NTB

² Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

eka.sintala@gmail.com

Abstract

This research aims to assess the relations between Local Own-source Revenue, capital expenditure and financial performance of the Local Government of West Nusa Tenggara Province, using Partial least square analysis. The assessment were undertaken to the local government of West Nusa Tenggara and 10 districts and cities within Nusa Tenggara region using secondary data including annual financial report of West Nusa Tenggara Government from 2009 to 2013.

The results showed that a effect Local Own-source Revenue on Regional Financial Performance as measured by the ratio of Independence. The study also generate Local Own-source Revenue effect on capital expenditure, and a effect on capital expenditures on financial performance area. Further, the results show that capital expenditure would mediate relation between local own revenue and regional financial performance. The implication of this research is that it can be used as a reference to making decision relating to regional revenue management specifically for management of local own-source revenue used for capital expenditure that is directly relating to public services.

Keywords : Capital Expenditure, Financial Performance of Local Government, Local Own –source Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan PAD, belanja modal dan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah di NTB, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Pengujian dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah Kabupaten/kota se-NTB dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di NTB tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio Kemandirian. Penelitian ini juga menghasilkan PAD berpengaruh terhadap Belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga membuktikan belanja modal dapat memediasi hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan Daerah. Implikasi penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendapatan daerah, terutama pengelolaan PAD untuk belanja modal yang dapat menyentuh langsung kepada pelayanan publik.

Kata kunci : Belanja modal, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya. Pengelolaan yang dimaksud berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat seperti kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mendapat tantangan berupa kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi-potensi kekayaan asli daerahnya untuk menjalankan roda Pemerintahan. Khusus dalam bidang keuangan daerah, Pemda di seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan keadaan dan potensi daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Menurut Sularso

dan Restianto (2011), pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.

Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kemandirian dan secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal kepada Pemerintah Pusat. Agustina (2013) menyatakan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

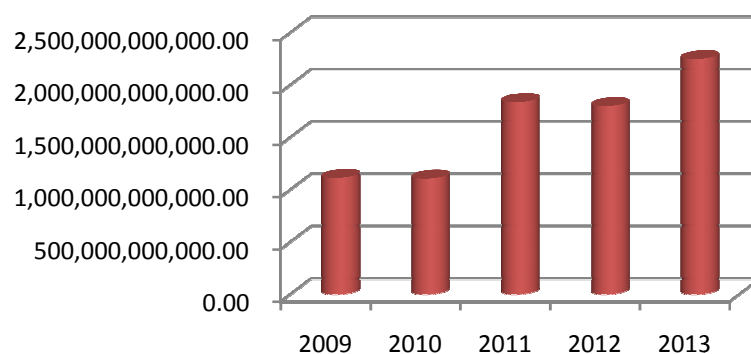
Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Provinsi, 8 Kabupaten dan 2 Kota masih masuk dalam kategori Pemerintah Daerah yang belum mandiri dan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, hampir 73% sumber pendapatan daerah di NTB berasal dari dana perimbangan (DAU 59%, DBH 8% dan DAK 7%), 13% berasal dari PAD dan 10% berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah di NTB selama 5 tahun cenderung meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, meskipun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 2,47%. Selama 5 tahun berturut-turut rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah di NTB masing-masing 7,99%; 8,48%; 12,16%; 9,59%; dan 10,40%. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di NTB belum mandiri secara *financial*.

Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya adalah pengeluaran Pemerintah Daerah (Sugiarti dan Supadmi, 2014). Pengeluaran pemerintah yang kemudian disebut belanja

pemerintah pada era UU Nomor 22 Tahun 1999, yang merupakan awal dimulainya otonomi daerah membagi belanja Pemerintah Daerah menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Salah satu komponen belanja publik adalah belanja modal. Struktur belanja kemudian berubah pada era UU Nomor 32 tahun 2004, belanja Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 yang dirubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007, membagi belanja Pemerintah Daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal.

Proporsi belanja modal Pemerintah Daerah di NTB selama

kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan trend yang fluktuatif dan belum mencapai target nasional. Studi Sugiono (2014) menyebutkan data Kementerian Dalam Negeri, bahwa Pemerintah Pusat memberikan target rata-rata realisasi belanja modal Pemerintah Daerah pada kisaran 22%-29% dari total belanja daerah sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Pemerintah Daerah di NTB selama periode tersebut hanya mampu memenuhi rata-rata proporsi belanja modal sebesar 18,90% dibandingkan dengan total belanja daerah pada tahun yang sama. Berikut gambar 1 menunjukkan trend belanja modal Pemerintah Daerah di NTB selama 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013.



Gambar 1. Trend Belanja Modal Pemerintah Daerah di NTB

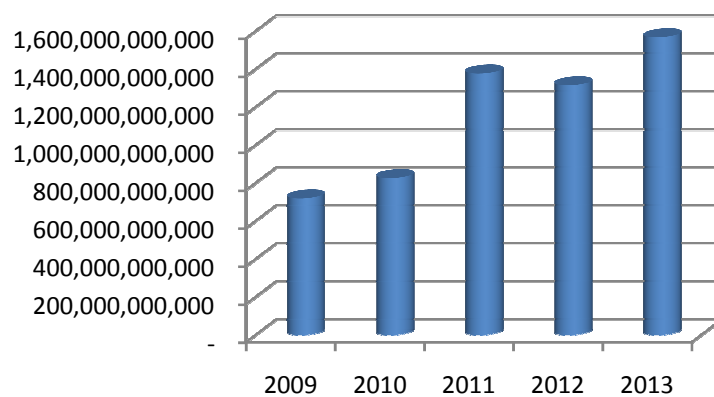
Studi Sugiono (2014) menemukan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal digunakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Sholikhah dan Wahyudin (2014) mengungkapkan bahwa belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pemerintah Daerah dapat

menggunakan sejumlah pendapatan daerah untuk merealisasikan sejumlah belanja daerah termasuk belanja modal. Pendapatan tersebut berupa PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD lebih besar dari pada kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dapat dialokasikan Pemerintah Daerah untuk belanja daerah dan salah satunya adalah untuk belanja modal.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah sejalan dengan teori entitas dana, teori ini menyebutkan bahwa dana dapat diartikan sebagai kas (uang), aset likuid atau sumber keuangan (*finanacial resources*) yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu (spesifik) (Suwardjono,

2011: 504). Salah satu sumber dana Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk belanja daerah terutama belanja modal adalah PAD.

Pendapatan daerah dari PAD pada sejumlah Pemerintah Daerah di NTB menunjukkan trend fluktuatif selama tahun 2009 - 2013. Berikut gambar trend pendapatan asli daerah di NTB



Gambar 2. Trend PAD Pemerintah Daerah di NTB

Gambar 2 menunjukkan trend PAD selama 5 tahun terakhir. Penerimaan PAD meningkat pada tahun 2010, 2011 dan 2013 sementara penerimaan PAD pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi PAD sebesar 13% terhadap total pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah di NTB masih lebih kecil dibandingkan kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Penggunaan PAD untuk membiayai sejumlah belanja daerah dan difokuskan untuk belanja modal yang produktif, kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah di NTB.

Seperti yang diungkapkan Harianto dan Adi (2007), dalam upaya untuk meningkatkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki

dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah.

Secara simultan, komponen PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Florida, 2006). Sejalan juga dengan studi Wenny (2012) yang menemukan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh langsung PAD terhadap tingkat kemandirian Pemerintah Daerah ditemukan oleh Darsono (2013). Studi Kurniawan (2011) menemukan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

Penggunaan PAD untuk merealisasikan belanja daerah

termasuk belanja modal, menjadi salah satu indikator bahwa Pemerintah Daerah mampu menggali sumber-sumber produktif di daerahnya dan digunakan membiayai jalannya pemerintahan. Meskipun persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di NTB masih lebih kecil dibandingkan kontribusi dana perimbangan. Namun, jika melihat penggunaan salah satu dana perimbangan yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai yaitu DAU, maka sisa DAU yang dapat digunakan untuk belanja diluar dari belanja pegawai persentase kontribusinya menjadi lebih kecil terhadap total pendapatan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan PAD.

PAD dapat mempengaruhi belanja modal suatu Pemerintah Daerah (Subowo dan Wati, 2010; Mayasari *et al.*, 2014). Sejalan dengan hal tersebut studi Tuasikal (2008) serta Sholikhah dan Wahyudin (2014), menemukan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan semakin besar realisasi PAD yang dikumpulkan Pemerintah Daerah, maka belanja modalnya juga semakin tinggi. Berbeda dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) yang menemukan PAD tidak mempengaruhi belanja modal Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Kurniawan (2011) yang berjudul Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kurniawan (2011) adalah, penelitian ini tidak menggunakan variabel DAU dan DAK serta penelitian ini menggunakan rasio kemandirian sebagai pengukur untuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah sementara studi Kurniawan

(2011) menggunakan PDRB sebagai ukuran dari kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS) sementara penelitian Kurniawan (2011) menggunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Selain dimotivasi oleh penelitian Kurniawan (2011), penelitian ini juga dimotivasi dengan kondisi pemerintah daerah di NTB yang masih belum mandiri, pentingnya belanja modal sebagai sarana untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah untuk pelayanan publik, serta trend belanja modal dan PAD yang cenderung fluktuatif. Dengan demikian penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara PAD, belanja modal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB dari sisi kemandirian daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di NTB? (2) Apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah di NTB? (3) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB?, dan (4) Apakah PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan melalui belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB?

Rerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

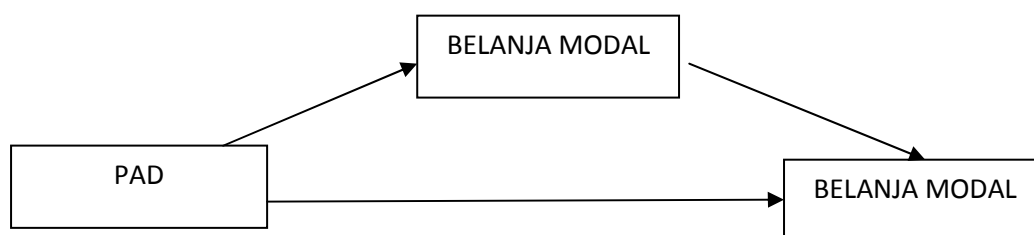
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan berbagai rasio, salah satunya adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai Pemerintahannya dengan pendapatan yang diperoleh dari menggali potensi-potensi kekayaan asli daerahnya.

Indikasi suatu daerah dikatakan mandiri secara keuangan adalah, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah lebih besar di dibandingkan kontribusi dana perimbangan atau penerimaan pendapatan dari pihak eksternal. Halim (2007: 232) menyatakan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tumpuan utama di era otonomi daerah saat ini, dan berkaitan erat dengan kemandirian suatu daerah. Studi Florida (2006) dan Wenny (2012) menghasilkan PAD dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pengaruh langsung PAD terhadap kinerja keuangan daerah dihasilkan oleh

Darsono (2013). Memanfaatkan pendapatan daerah yang berasal dari PAD untuk sejumlah belanja daerah khususnya belanja modal, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. PAD dapat mempengaruhi belanja modal Pemerintah Daerah (Tuasikal, 2008; Subowo dan Wati, 2010; Mayasari *et al.*, 2014; Solikhah dan Wahyudin, 2014). Belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Sugiono, 2014). Belanja modal dapat memediasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Kurniawan, 2011).

Dengan demikian paradigma penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Paradigma Penelitian

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui tingkat kemandiriannya dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. PAD merupakan cerminan kemandirian daerah. PAD yang meningkat dari tahun ketahun dan mampu membiayai jalannya Pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Studi Florida (2006) dan Wenny (2012) menemukan secara simultan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan, semakin

tinggi PAD yang dikumpulkan Pemerintah Daerah maka kinerja keuangannya semakin baik. Studi Darsono (2013) melihat ada pengaruh langsung PAD terhadap kemandirian daerah yang merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan daerah. PAD yang terus meningkat dari tahun ketahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa menggunakan pendapatannya sendiri untuk membiayai belanjanya, dengan demikian dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dari sisi kemandirian.

Pengelola sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari PAD sejalan dengan perspektif teori entitas dana, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah menggunakan dana *liquid* berupa PAD yang masuk ke kas daerah, untuk membiayai kegiatan atau program guna mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan PAD yang optimal untuk tujuan tertentu dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat yang telah membayar sejumlah pungutan yang masuk ke dalam kas daerah, harus dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai dan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Salah satu cara untuk melaksanakan hal tersebut adalah belanja modal. Pemerintah Daerah dapat menggunakan sejumlah pendapatan yang diterima dari masyarakat berupa PAD untuk merealisasikan belanja modal.

Teori entitas dana pada intinya menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan spesifik, sejumlah sumber dana seperti uang tunai dan aset likuid dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan atau program. Penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana Pemerintah Daerah mengelola dananya berupa PAD untuk kegiatan atau program seperti belanja modal.

Sejumlah studi menemukan ada keterkaitan antara penerimaan PAD dengan realisasi belanja modal (Subowo dan Wati, 2010; Mayasari *et al.*, 2014). PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pemerintah Daerah (Tuasikal, 2008; Solikhah dan Wahyudin, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima maka realisasi belanja modal Pemerintah Daerah juga semakin tinggi. Namun studi Abdullah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) mengindikasikan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD masih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

Pengelolaan PAD yang optimal baik itu yang berhubungan dengan target dan realisasi, diharapkan dapat meningkatkan realisasi belanja modal. Seperti yang diketahui bersama bahwa rata-rata target belanja modal pada Pemerintah daerah di NTB belum memenuhi target nasional. PAD dapat dimanfaatkan Pemerintah daerah di NTB untuk merealisasikan belanja modal, karena PAD lebih leluasa digunakan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan dana perimbangan yang penggunaannya masih mendapat campur tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H₂ : PAD Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Setiap Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut.

Apabila masyarakat sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka masyarakat dapat menjalankan roda perekonomiannya, dan menjalankan segala aktifitasnya yang berimbas pada meningkatnya kemampuan mereka membayar

sejumlah pungutan yang telah ditetapkan, baik itu berupa pajak maupun retribusi. Kondisi ini dapat menambah pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk belanja modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Sugiono, 2014). Sejalan dengan studi sebelumnya, studi Darsono (2013), Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) juga melihat ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. Berbeda dengan studi Nugroho (2012) menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja modal, merupakan salah satu kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana yang mampu dikumpulkan Pemerintah Daerah. Dana tersebut dapat berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Belanja Modal Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu sarana untuk menunjang pelayanan publik. Dengan belanja modal yang tepat guna, Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan sejumlah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah, salah satunya yang bersumber dari PAD.

Penggunaan pendapatan daerah terutama PAD yang tepat guna yaitu untuk belanja modal

yang dapat menyentuh langsung pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dari sisi kemandirian daerah. Hal ini sejalan dengan perspektif teori entitas dana, dimana Pemerintah Daerah mengelola dana yang bersumber dari pendapatan sendiri yang masuk ke kas daerah untuk membiayai suatu kegiatan atau program dalam hal ini belanja modal untuk mencapai tujuan tertentu yaitu meningkatkan kinerja keuangan daerah. PAD dapat berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Darsono, 2013), studi Solikhah dan Wahyudin (2014) melihat ada pengaruh PAD terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Studi Sugiono (2014) melihat ada pengaruh belanja modal terhadap kemandirian Pemerintah Daerah, serta PAD dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening (Kurniawan, 2011).

Mengelola pendapatan daerah terutama PAD untuk belanja daerah yang lebih menyentuh pelayanan publik, yaitu melalui belanja modal dalam bentuk sarana, prasarana dan infrastruktur yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat, kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis ke dua penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota. Penelitian ini merupakan penelitian sensus karena mengambil seluruh populasi

sebagai subjek penelitian. Data penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013. Data diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

yaitu *www.djpk.kemenkeu.go.id* dan *Website* Pemerintah Daerah masing-masing Pemerintah Daerah. Daftar populasi penelitian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7.	Kabupaten Sumbawa Barat
2.	Kota Mataram	8.	Kabupaten Sumbawa
3.	Kabupaten Lombok Barat	9.	Kabupaten Dompu
4.	Kabupaten Lombok Utara	10.	Kabupaten Bima
5.	Kabupaten Lombok Tengah	11.	Kota Bima
6.	Kabupaten Lombok Timur		

Sumber : www.ntbprov.go.id (diolah)

Analisis statistik yang digunakan adalah model struktural dengan alat analisis *Partial Least Square (PLS)* menggunakan software *SmartPLS versi 2.0.m3*. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Lebih lanjut, Wold (1998) dalam Latan dan Ghazali (2012:6) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang *powerfull* dan sering disebut juga sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) regresi.

Ada beberapa pengujian untuk model struktural dalam penelitian ini diantaranya : *R Square* pada konstruk *endogen*. Nilai *R Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk *endogen*, digunakan untuk melihat kemampuan variabel-variabel *eksogen* untuk menerangkan variabel *endogen*. Menurut Chin (1998) dalam Latan dan Ghazali (2012:85) nilai *R square* 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah).

Goodness of Fit (GOF), merupakan ukuran tunggal yang

digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). *GOF* index diukur dengan rumus : $GOF = \sqrt{\overline{COM} * \overline{R^2}}$

Keterangan : *GOF* = *Goodness Of Fit*, \overline{COM} = Rerata Comunalicity, $\overline{R^2}$ = Rerata R-square.

Kriteria index *GOF* adalah 0 sampai dengan 1 dengan interpretasi nilai yaitu 0.1 (*GOF* kecil), 0.25 (*GOF* moderat) dan 0.36 (*GOF* besar).

Uji hipotesis 1, 2 dan 3 yaitu dengan melihat *Estimate for Path Coefficients*, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Dilakukan dengan prosedur *Bootstrapping* seperti resampling yang dipilih pada tahapan 3. Nilai signifikansi yang digunakan (*one-tailed*) *t-value* 1,64 (*Significance level* = 5%). Dalam penelitian ini, hipotesis dapat diterima jika memiliki nilai *t statistics* (*t* hitung) pada tabel *Path Coefficient output* *SmartPLS 2.0 M3* lebih besar dari *t-tabel* (1,64).

Untuk uji hipotesis ke-4 menggunakan *sobel test* dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{P_1.P_2}{SP_1P_2}$$

Keterangan : t = nilai statistik , P_1 = koefisien parameter pengaruh variabel PAD terhadap belanja modal, P_2 = Koefisien parameter pengaruh variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, SP_1P_2 = Standar error variabel PAD dan Belanja Modal.

Standar deviasi variabel PAD dan Belanja modal dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$SP_1P_2 = \sqrt{P_2^2 SP_1^2 + P_1^2 SP_2^2 + SP_1^2 SP_2^2}$$

Keterangan : SP_1 = Standar error variabel PAD, SP_2 = Standar error variabel belanja modal

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Permendagri 13 tahun 2006). Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan Rasio kemandirian, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Penggunaanrasio kemandirian sebagai pengukur dari kinerja keuangan daerah, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. PAD merupakan cerminan dari kemandirian daerah. Apabila Pemerintah Daerah dapat memperoleh dan menggunakan PAD sebagai pendapatan yang paling dominan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri secara *financial*.

Belanja Modal menurut Halim (2002:73), merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Belanja modal meliputi realisasi belanja tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya. Indikator belanja modal diukur dengan rumus di bawah ini yang diambil dari laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013. Indikator belanja modal diukur dengan : Belanja Modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jaringan + belanja aset tetap lainnya

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. PAD terdiri dari realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Indikator PAD diukur dengan rumus dibawah ini yang diambil dari laporan realisasi anggaran tahun 2009 sampai dengan 2013. Indikator PAD diukur dengan : PAD = realisasi pajak daerah + realisasi retribusi daerah + realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + realisasi lain-lain PAD yang sah.

PEMBAHASAN

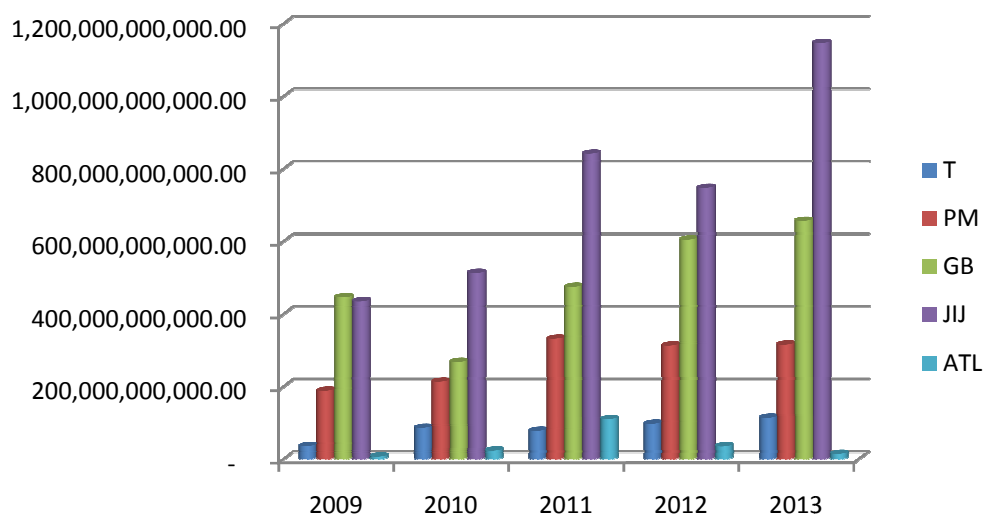
Gambaran Umum Objek Penelitian

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah, terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beribu Kota di Mataram, Provinsi NTB terdiri dari 8

(delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota.

Dilihat dari segi otonomi daerah, jumlah Pemerintahan Daerah di wilayah NTB sebanyak 11 Pemda, karena ditambah dengan Pemerintah Provinsi NTB. Secara keuangan dan pelaporannya, di era otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal saat ini, maka ke-11 Pemda di NTB mengelola keuangan secara mandiri. Belanja modal Pemda di NTB selama tahun 2009 sampai dengan 2013 jumlahnya cenderung menunjukkan trend fluktuatif seperti gambar dan tabel di bawah ini :



Gambar 4. Trend Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di NTB

Tabel 2. Realisasi Belanja Modal Pemda di NTB

	2009	2010	2011	2012	2013
T	35,684	86,107	77,598	97,295	114,016
PM	188,182	213,507	331,806	313,262	315,717
GB	445,829	267,851	474,599	604,960	656,592
JIJ	434,618	513,206	841,732	747,568	1.146,616
ATL	7,052	23,794	110,038	35,086	14,546
Total BM	1.111,365	1.104,465	1.835,773	1.798,171	2.247,487

Sumber : DJPK (diolah, 2015) dalam jutaan rupiah

Berdasarkan gambar 4 dan tabel 2, dapat dilihat bahwa total belanja modal pada Pemda di NTB meningkat pada tahun 2011 dan 2013 masing-masing sebesar 66,21% dan 24,98% jika dibandingkan dengan total belanja

modal pada tahun 2010 dan 2012. Sementara pada tahun 2010 dan 2012 terjadi penurunan total belanja modal masing-masing sebesar 0,62% dan 2,04% apabila dibandingkan dengan belanja modal tahun 2009 dan 2011.

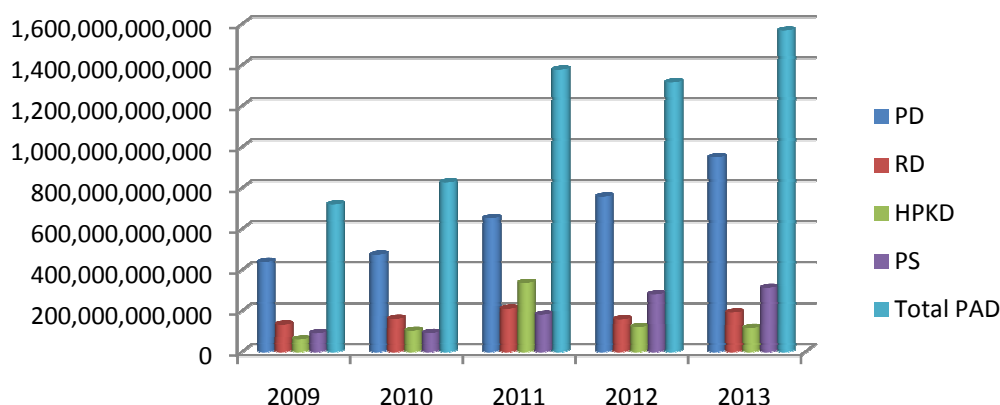
Pendapatan asli daerah (PAD) Pemda di NTB berkontribusi sebesar 13% pada total pendapatan daerah selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Selama kurun waktu

tersebut, jumlah penerimaan PAD cenderung fluktuatif seperti yang ditunjukkan tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3. Realisasi PAD Pemerintah Daerah di NTB

	2009	2010	2011	2012	2013
PD	437,907	474,159	651,825	757,262	949,624
RD	131,727	160,216	209,525	157,854	191,039
HPKD	59,669	102,055	335,457	119,774	115,662
PS	89,734	90,474	180,952	279,967	311,437
Total PAD	719,037	826,904	1.377,759	1.314,857	1.567,762

Sumber : DJPK (diolah, 2015) dalam jutaan rupiah



Gambar 5. Trend Realisasi PAD Pemerintah Daerah di NTB

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 5, dapat dilihat penerimaan PAD pada Pemda di NTB meningkat pada tahun 2010 sebesar 15% atau setara dengan Rp.107,867 juta dibandingkan tahun 2009. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 yaitu meningkat sebesar 66% atau setara dengan Rp.550,956 juta dibandingkan tahun 2010. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan

sebesar 4,56% atau setara dengan Rp.62,89 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan PAD terjadi lagi di tahun 2013 sebesar 19,23% atau setara dengan Rp.252,9 juta. Sementara itu gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di NTB

KINERJA	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013

RASIO					
KEMANDIRIAN	7,99%	8,48%	12,16%	9,59%	10,40%

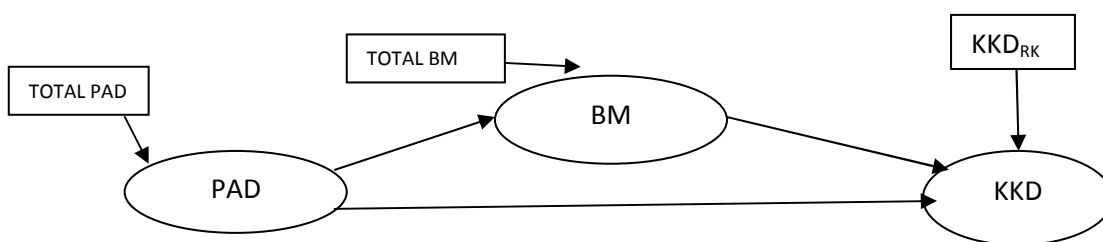
Sumber data : DJPK (diolah, 2015)

Berdasarkan tabel 4, kinerja keuangan Pemda di NTB yang dilihat dari rasio kemandirian masih masuk dalam kategori Pemda yang belum mandiri atau tingkat kemampuan keuangan daerahnya masih rendah sekali. Hal ini disebabkan karena rasio kemandirian Pemda di NTB masih dalam kisaran 7%-11% selama 5 (lima) tahun terakhir. Kemampuan keuangan Pemda meningkat pada tahun 2010 sebesar 0,49%. Pada tahun 2011 meningkat lagi sebesar 3.58%. Namun, ditahun 2012

terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah sebesar 2,47% dan meningkat lagi di tahun 2013 sebesar 0,81%.

Analisis dan Data

Penelitian ini melibatkan 1 variabel eksogen yaitu PAD, 1 variabel endogen yaitu Kinerja Keuangan Daerah (KKD) dan 1 Variabel mediating/intervening yaitu belanja modal. Model Penelitian ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 6 Model Penelitian

Model persamaan struktural dalam penelitian ini diukur dengan:

$$KKD = \gamma_1 PAD + \zeta_1 \dots \dots \dots 1$$

(Hubungan langsung)

$$KKD = \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \zeta_2 \dots \dots \dots 2$$

(Hubungan tidak langsung)

Keterangan:

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif data penelitian ini diambil dari realisasi PAD, belanja modal dan perhitungan rasio kemandirian pada Pemerintah Daerah di NTB yang terdiri dari 1 Provinsi, 8 Kabupaten dan 2 Kota, selama 5 tahun sejak tahun 2009

- β_1 = Beta, koefisien pengaruh variabel PAD terhadap variabel BM
- β_2 = Beta, koefisien pengaruh variabel BM terhadap variabel KKD
- γ = Gamma, koefisien pengaruh variabel PAD terhadap variabel KKD
- ζ = Zeta, galat model

sampai dengan 2013. Jumlah data pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 tahun x 11 wilayah = 55 data pengamatan. Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTALKKD	55	.02	.44	.0975	.10050
TOTALPAD	55	7225339807	858154094987	105569455870.75	187594424669.916
TOTALBM	55	16630074400	450279190236	147222929404.64	86803597521.389
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan daerah memiliki rasio minimum pada angka 2% dan nilai maksimum pada angka 44%. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 9,75%, artinya bahwa rata-rata kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di NTB masih rendah sekali. Rasio kemandirian terendah ada pada Kota Bima pada tahun 2009 sampai dengan 2011 sementara rasio kemandirian tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2013. Standar deviasi variabel kinerja keuangan daerah sebesar 10,05%.

Variabel PAD memiliki angka realisasi terendah di Kota Bima tahun 2009 sebesar Rp. 7,225 Milyar dan penerimaan PAD tertinggi pada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2013 sebesar Rp. 858,154 Milyar. Rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp. 105,569 milyar. Standar deviasi variabel PAD sebesar Rp. 187,594 Milyar.

Variabel belanja modal memiliki angka realisasi terendah sebesar Rp. 16,63 Milyar di Kabupaten Lombok Utara tahun 2009 serta realisasi belanja modal tertinggi sebesar Rp. 450,279 milyar di Provinsi NTB tahun 2013. Rata-rata realisasi belanja modal selama 5 tahun sebesar Rp. 147,222 milyar. Standar deviasi variabel belanja modal sebesar Rp.86,80 Milyar.

Hasil Algoritma dan Bootstrapping PLS

Hasil kalkulasi algoritma dengan smartPls dapat menghasilkan perhitungan koefisien determinasi (R^2), seperti yang ada dalam tabel berikut ini :

Table 6. R Square

Konstruk	R Square
BM	0,6101
KKD	0,1379
PAD	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa : Konstruk variabel belanja modal (BM) dapat diterangkan oleh konstruk variabel PAD sebesar 61,01% sementara 38,99% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selain itu variabel PAD masuk dalam kategori moderat untuk menerangkan variabel belanja modal karena nilai r^2 $>0,33$ dan $<0,67$.

Konstruk variabel kinerja keuangan daerah (KKD) dapat diterangkan oleh konstruk variabel belanja modal (BM) dan PAD sebesar 13,79% atau masuk dalam kategori lemah karena nilai r^2 $0,1379 <0,19$. Sementara itu 86,21 % variabel kinerja keuangan daerah diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Perhitungan *Goodness of Fit model* penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Goodness of Fit

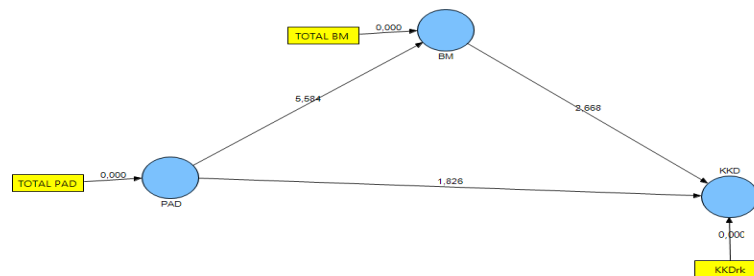
	R-Square	Communality	GOF
KKD	0,6101	1	
BM	0,1379	1	0,61
PAD		1	
Rerata	0,374	1	

Sumber : Data Diolah

Tabel 7 menunjukkan index GOF 0,61 yang artinya variansi yang dijelaskan oleh konstruk-konstruk dalam model lebih besar dari faktor residual diluar model. Berdasarkan kriteria index GOF maka model dalam penelitian ini masuk dalam

kategori besar, karena index GOF > 0,36.

Berikut gambar 7 merupakan hasil bootstrapping SmartPLS, untuk memperoleh koefisien korelasi antar variabel dalam penelitian ini.



Gambar 7. Hasil Bootstapping SmartPLS

Berdasarkan bootstrapping diperoleh hasil koefisien jalur model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. *Path Coefficients* (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	T Statistics (O/STERR)	Keterangan
PAD -> BM	0,7811	0,749	2,6684	Signifikan
BM -> KKD	0,5948	0,5663	5,5838	Signifikan
PAD -> KKD	0,4644	0,4259	1,8262	Signifikan

Sumber : *output bootstrapping smartpls* (2015)

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa : Hipotesis ke-1 dalam penelitian ini diterima yaitu PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah karena koefisien parameternya menunjukkan arah positif sebesar 0,4644 dan nilai t statistiknya 1,8262 > t tabel 1,64 (*one tailed*).

Hipotesis ke-2 dalam penelitian ini diterima yaitu PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal karena koefisiennya menunjukkan arah positif sebesar 0,7811 dan nilai t statistiknya 2,6684 > t tabel 1,64.

Hipotesis ke-3 dalam penelitian ini juga diterima yaitu

belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien parameter dengan arah positif sebesar 0,5948 dan nilai t statistik 5,5838 > nilai t tabel 1,64.

Sementara untuk menguji hipotesis ke-4 yaitu Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Belanja Modal dilakukan perhitungan dengan rumus Sobel.

Tabel 9. Hasil Koefisien Jalur dan Standar Error

	P	Standar Error
PAD -> BM	0,7811	0,1399
BM -> KKD	0,5948	0,2543

Sumber : *Output Bootstrapping SmartPLS* (2015)

Berdasarkan hasil pada tabel 9, selanjutnya dilakukan perhitungan standar error variabel PAD dan belanja modal sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 SP_1P_2 &= \sqrt{P_2^2SP_1^2 + P_1^2SP_2^2} + \\
 &SP_1^2SP_2^2 \\
 &= \\
 &\sqrt{0,00692432 + 0,0119412 + 0,00097242} \\
 &= 0,1408472932
 \end{aligned}$$

Setelah standar error diketahui selanjutnya pengaruh mediasi belanja modal pada PAD terhadap kinerja keuangan daerah dengan rumus Sobel :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{P_1 \cdot P_2}{SP_1P_2} \\
 &= \frac{0,46459828}{0,1408472932} \\
 &= 3,29859
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian dengan rumus Sobel menunjukkan bahwa Belanja modal dapat memediasi Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t statistik 3,29859 > t tabel 1,64. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ke 2 (H₂) penelitian ini diterima.

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah maka Kinerja Keuangannya semakin baik atau

semakin mandiri, karena dengan meningkatnya PAD Pemerintah Daerah di NTB dapat memenuhi pembiayaannya untuk belanja daerah.

Meskipun rasio kemandiriannya masih rendah sekali yaitu ada pada rata-rata 9,75%, namun selalu ada upaya dari Pemerintah Daerah di NTB untuk meningkatkan target dan realisasi PAD setiap tahunnya. Pemerintah Daerah di NTB diharapkan dapat terus menggali dan menggunakan secara optimal seluruh potensi kekayaan daerah yang dimiliki, agar kemampuan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik yang akan berujung pada tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ketahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darsono (2013) yang menemukan ada pengaruh langsung PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana Pemerintah Daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Sejalan juga dengan penelitian Wenny (2012), yang menemukan bahwa PAD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi teoritis yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah terutama dalam pengelolaan PAD. Teori yang di maksud adalah teori entitas dana, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah di NTB berupaya mengelola dana yang masuk ke kas daerah dalam bentuk PAD untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya, meskipun PAD hanya berkontribusi 13% terhadap total pendapatan daerah di NTB. Kedepan dengan hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah di NTB dapat membuat suatu regulasi tentang potensi-potensi PAD yang menjadi target penerimaan daerah setiap tahunnya dan regulasi mengenai pengelolaan PAD yang lebih terarah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua (H₂) penelitian ini diterima yaitu PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah di NTB maka realisasi belanja modalnya juga semakin besar. Meskipun belum mencapai target nasional selama lima tahun terakhir, namun Pemerintah Daerah di NTB terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana wilayahnya dengan belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) serta Solikhah dan Wahyudin (2014), yang menemukan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemda. Namun demikian, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) yang mendapatkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Hal ini

mengindikasikan, Pemerintah Daerah masih belum menggunakan PAD untuk mengoptimalkan belanja modal, tetapi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah di NTB untuk lebih meningkatkan belanja modal dan menggunakan PAD sebagai sumber pembiayaan utama untuk belanja tersebut. Pemerintah Daerah di NTB juga harus terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan terus menggali potensi-potensi penerimaan PAD di daerah masing-masing.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hipotesis ke-3 (H₃) dalam penelitian ini diterima yaitu belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di NTB. Hal mengindikasikan bahwa belanja modal yang besar dan optimal seperti belanja modal yang dapat menunjang sarana dan prasarana publik akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan studi Sugiono (2014) yang menemukan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dari sisi kemandirian dengan arah yang positif. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi belanja modal yang direalisasikan Pemerintah Daerah maka kemandirian atau kemampuan keuangannya semakin meningkat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darsono (2013) yang menemukan tidak ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dari sisi kemandirian. Penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) juga tidak sejalan dengan penelitian ini, karena studi tersebut

menemukan belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan, belanja modal yang direalisasikan Pemerintah Daerah belum maksimal menunjang infrastruktur, sarana dan prasarana daerah.

Optimalisasi realisasi belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan berpihak kepada publik, menjadi harapan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah di NTB. Kedepan, sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah di NTB untuk mengkaji mengenai belanja modal yang menjadi prioritas masyarakat dan belanja modal yang menjadi kepentingan aparatur. Pemerintah Daerah di NTB, diharapkan lebih mempertegas mengenai regulasi kapitalisasi belanja modal serta merencanakan belanja modal yang benar-benar menyentuh pada pelayanan publik seperti jalan, irigasi dan jaringan serta pemenuhan alat-alat kesehatan dan pendidikan.

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Hipotesis ke-4 (H_4) penelitian ini diterima yang artinya belanja modal dapat memediasi hubungan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila PAD digunakan untuk belanja modal yang lebih produktif dan menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi lebih baik.

Penelitian sejalan dengan penelitian Solikhah dan Wahyudin (2014) serta Sugiono (2014) yang melihat ada pengaruh PAD terhadap belanja modal dan ada pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan, perolehan PAD yang besar dapat mempengaruhi besarnya belanja modal dan belanja

modal yang besar terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat lebih meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Pemerintah Daerah di NTB kedepan diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatannya terutama yang berasal dari PAD, dan menggunakannya secara optimal untuk belanja modal yang lebih menyentuh kepada pelayanan publik, seperti belanja modal yang dapat mendukung sarana, prasarana dan infrastruktur publik misalnya jalan, irigasi serta peralatan dan mesin. Sehingga diharapkan, dengan terpenuhinya pelayanan kepada publik, maka masyarakat dapat membayar berbagai pungutan yang sah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, yang berimbas pada penambahan pendapatan daerah dan berimbas pula pada kinerja keuangan daerah dari sisi kemandirian daerah yang dapat meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori entitas dana yaitu dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah terutama PAD untuk belanja daerah yaitu belanja modal yang dapat berimplikasi pada tujuan Pemerintah Daerah yaitu peningkatan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah di NTB untuk mengelola PAD secara optimal untuk belanja modal yang menyentuh langsung pada masyarakat / publik, dan masyarakat / publik dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu ukuran dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB.

PENUTUP

Simpulan

PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal Pemerintah

Daerah di NTB. Hal ini mengindikasikan penggunaan PAD untuk belanja modal. Semakin tinggi PAD yang diterima maka realisasi belanja modalnya juga semakin besar. Meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 13%, namun keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola PAD berpengaruh terhadap pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal.

Belanja modal Pemerintah Daerah di NTB berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah dari sisi kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan, belanja modal yang optimal untuk sarana dan prasarana publik dan langsung menyentuh kepada publik dapat berimplikasi terhadap kemandirian daerah. Meskipun rasio kemandirian Pemerintah Daerah di NTB masih dalam kategori rendah sekali, namun selama 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 Pemerintah Daerah terus berusaha meningkatkan rasio kemandiriannya, terbukti selama 5 tahun tersebut hanya tahun 2012 terjadi penurunan rasio kemandirian.

PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB melalui belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa jika PAD digunakan untuk belanja modal yang dapat menyentuh pelayanan publik, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB dapat meningkat. Meskipun rasio kemandirian yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah di NTB, masih belum menunjukkan kemampuan keuangan yang baik atau masih dalam kategori kemandirian yang rendah sekali. Namun Pemerintah Daerah di NTB tetap berusaha untuk menggali potensi-potensi asli daerahnya seperti mencanangkan balik nama

plat nomor kendaraan luar secara gratis, agar pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas Pemerintah Daerah bertambah sehingga PAD dapat meningkat dan dapat digunakan untuk belanja modal yang lebih menyentuh pelayanan publik, serta meningkatkan kemampuan keuangannya dengan menargetkan perolehan PAD meningkat setiap tahun. Sehingga kedepan dengan tetap konsisten menggali sumber-sumber potensial pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah di NTB dapat meningkatkan belanja modalnya dan dapat berdampak pada kemampuan keuangan yang semakin meningkat setiap tahun.

Saran

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat memberikan arah bagi penelitian mendatang. Pertama, rentang waktu penelitian ini hanya lima tahun dengan objek hanya pada Pemerintah Daerah di NTB, diharapkan penelitian mendatang menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dengan objek yang lebih luas, agar hasilnya dapat lebih baik lagi. Kedua, variabel kinerja keuangan daerah hanya menggunakan satu rasio keuangan, penelitian kedepan diharapkan mencari indikator lain dari kinerja keuangan daerah, agar kesimpulan yang diperoleh lebih mendalam. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel eksogen, penelitian mendatang dapat menambah variabel eksogen lain terutama yang berkaitan dengan variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan

- Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 No.2, hal 17-32.
- Agustina, O. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun 2007-2011). *Jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/394/339pdf*. (1 Maret 2015).
- Darsono, I.L. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 1, No. 8, hal 11-21.
- Darwis, E.T.R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1605/1228>. (1 April 2015).
- Florida, A. 2006. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Tesis. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4027>. (20 Agustus 2015).
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hariato, D., dan P.H. Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium nasional Akuntansi X Makasar*
- Imawan, R., dan A.Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3 No.2, hal 147-155.
- Kurniawan, K. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Tesis. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29337>. (20 Agustus 2015).
- Latan, H., dan I. Ghozali. 2012. *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mayasari, L. P. R., N. K. Sinarwati., dan G.A.Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 No.1.
- Nugroho, F. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1, No. 2, hal 1-14.
- Paujiah, S. P. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). journal.unsil.ac.id/download.php?id=367. (25 Desember 2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Sholikhah, I., dan A.Wahyudin. 2014. Analisa Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3, No.4, hal 553-562
- Subowo dan E. R. Wati. 2010. Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2, No.2, hal 73-82.
- Sugiarthi, N. P. D. E. R., dan N. L. Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU,dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 7, No.2, hal 477-497
- Sugiono, S. 2014. Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2, No. 3, hal 1-27.
- Sularso, H. dan Y. E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1, No.2, hal 109-124.
- Suardjono. 2011. *Teori Akuntansi : Perekayasa Laporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1, No.2, hal 142-155.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2, No.1, hal 44-51.
- Wenny, C.D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 2(1) : 39-51.
<http://eprints.mdp.ac.id/676/1/4.%20CHERRYA%20.pdf>, (20 Agustus 2015).